



Jurnal Ekspos

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus



Analisis Perumusan Tujuan Pembangunan Bidang Ekonomi dalam Rancangan RPD Kabupaten Kudus 2024 - 2026 menggunakan *logical framework approach* (LFA)

Tristianto^{1✉}, Yusuf Iswahyudi², Andrianto Wirawan³, Agus Supriyanto⁴

1 Bappeda Kabupaten Kudus

✉ trist@iuj.ac.jp 1

Info Artikel

Riwayat:

Diterima :

Direvisi :

Disetujui :

Kata kunci:

Logical framework
approach, Rencana
Pembangunan Daerah,
Kabupaten Kudus

Abstrak

Tujuan pembangunan secara substansi memberikan arah perencanaan pembangunan daerah kepada suatu kondisi tertentu yang akan diinginkan. Dalam bidang ekonomi, keadaan yang diinginkan pada perencanaan pembangunan digambarkan dalam capaian atas hasil usaha kegiatan-kegiatan ekonomi masing-masing lapangan usaha yang terbentuk secara akumulatif dalam Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) Kabupaten Kudus. Hal tersebut tercermin pada rata-rata pendapatan masyarakat terhadap PRDB atau disebut dengan pendapatan per kapita daerah. Untuk menyikapi hal tersebut daerah memberikan jawaban atas isu strategis daerah yang menjadi tema pembangunan daerah. Untuk RPD tahun 2024 – 2026 dalam perencanaan pembangunan perlu menetapkan tujuan yaitu transformasi ekonomi yang berdaya saing sebagai tujuan daerah yang akan dicapai pada perencanaan pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Kudus. Hal tersebut dilakukan dengan tetap mempertimbangkan perkembangan isu strategis dalam bidang ekonomi yang berkembang pada tingkat global, nasional, provinsi, maupun daerah. Secara teknokratik dan dengan menggunakan metodologi *logical framework* analisis perencanaan digunakan untuk merumuskan transformasi ekonomi Kabupaten Kudus sebagai tujuan pembangunan yang diusulkan dalam rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus.

ISSN 3110-570X (print)

ISSN 3110-4932 (online)

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan menjadi faktor penting yang harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan dalam berbagai tingkat pemerintahan sebagai acuan kondisi akhir yang akan dicapai sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan daerah. Tujuan pembangunan dalam bidang ekonomi menggambarkan kondisi akhir tingkat kemajuan ekonomi daerah dalam berbagai lapangan usaha yang direpresentasikan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kudus dan Pendapatan Rata – rata Masyarakat / Pendapatan per Kapita (Munir, 2021; Nihayah, 2022). Tujuan pembangunan daerah yang akan dibahas mendasarkan pada penentuan isu strategis daerah, tujuan pembangunan nasional bidang ekonomi, dan tujuan pembangunan provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan isu strategis ekonomi Global, ekonomi Nasional,

ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan ekonomi daerah Kabupaten Kudus itu sendiri (Mahadiansar et. al., 2020; Suri, 2019).

Perumusan Tujuan Pembangunan Bidang Ekonomi dalam Rancangan RPD Kabupaten Kudus 2024 – 2026 dalam Rancangan RPD Kabupaten Kudus 2024 – 2026 dilakukan secara teknokratik dengan menggunakan metode ilmiah sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi tim penyusun Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kudus 2024 - 2026 dari Bappeda Kabupaten Kudus (Leontinus, 2022). Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kudus merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok penyusunan dokumen perencanaan daerah membentuk tim penyusun Rencana Daerah (RPD) Kabupaten Kudus tahun 2024-2026.

Perumusan Masalah

Perlu dilakukan identifikasi tujuan pembangunan daerah yang mencantumkan rumusan kondisi akhir yang akan dicapai terutama dalam bidang ekonomi secara makro yang mencerminkan informasi riil capaian kemajuan ekonomi masyarakat pada seluruh lapangan usaha serta melihat bagaimana dinamika perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah untuk dapat dituangkan dalam dokumen Rancangan akhir RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026. Penetapan tujuan pembangunan daerah bidang ekonomi akan dituangkan dalam Bab V Rancangan RPD 2024-2026 dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan bab – bab berikutnya (Bihamding, 2019). Apabila tidak dilaksanakan indentifikasi tujuan pembangunan daerah dalam bidang perekonomian dalam penyusunan RPD 2024 - 2026, dikhawatirkan dapat menyebabkan tidak adanya arah tujuan akhir yang harus dicapai dalam dokumen perencanaan dalam memotret kondisi akhir lingkungan makro ekonomi yang menjadi dasar dalam penyusunan sasaran, strategi sampai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Bab – bab selanjutnya dalam dokumen RPD itu sendiri.

Pembahasan tujuan pembangunan daerah dalam bidang perekonomian selanjutnya menjadi bahan perumusan kebijakan pada penentuan program kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan RPD Kabupaten Kudus 2024. Hal – hal yang perlu disampaikan antara lain adalah kontribusi dan pertumbuhan ekonomi lapangan usaha, kontribusi lapangan usaha terhadap total PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi. Selain itu, juga perlu disampaikan juga penyandingan tujuan pembangunan nasional dan tujuan pembangunan daerah regional Jawa Tengah sebagai rujukan dan acuan dalam penyusunan tujuan pembangunan daerah bidang perekonomian.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan laporan indentifikasi tentang tujuan pembangunan daerah bidang perekonomian dalam Rancangan RPD Kabupaten Kudus 2024 - 2026 sebagai bahan acuan penyusunan dokumen Rancangan RPD Kabupaten Kudus 2024 - 2026 terutama pada Bab V menjadi acuan bagi penyusunan dokumen bab – bab selanjutnya dalam RPD Kabupaten Kudus 2024 - 2026.

Tujuan khusus bagi penulis dalam penyusunan laporan indentifikasi tujuan pembangunan daerah bidang perekonomian dalam Rancangan RPD Kabupaten Kudus 2024 - 2026 adalah sebagai dokumen pengumpulan angka kredit bagi penilaian kinerja sebagai ASN Fungsional Perencana Ahli Muda.

Manfaat dari penyusunan laporan indentifikasi tentang tujuan pembangunan daerah bidang perekonomian dalam Rancangan RPD Kabupaten Kudus 2024 - 2026 adalah tersedianya rumusan tujuan pembangunan daerah yang menggambarkan kondisi akhir yang akan dicapai sebagai hasil pembangunan daerah yang menjadi kondisi akhir yang ingin dicapai dalam kemajuan ekonomi masyarakat secara makro.

METODE PENELITIAN

Perumusan tujuan perencanaan pembangunan merupakan bagian yang terpisahkan dari dokumen perencanaan daerah yang diatur dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Salah satu pendekatan penyusunan perencanaan yang

dilakukan dalam rangkaian penyusunan perencanaan adalah pendekatan teknokratik (Qodrianto & Meytasari, 2019). Pendekatan teknokratik dalam hal ini diartikan sebagai pendekatan penyusunan perencanaan yang menggunakan metode dan kerangka berpikir secara ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional mempunyai tugas dalam penyusunan perencanaan Pembangunan (Kehler & Birchall, 2021). Bappeda Kudus dalam hal ini, bertindak sebagai satuan kerja pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyusunan perencanaan daerah, membentuk tim untuk menyusun rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 – 2026.

Secara ilmiah, perumusan tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus menggunakan pendekatan logical framework approach (LFA). Pendekatan dengan metode LFA ini awalnya diperkenalkan oleh US. Agency for International Development (USAID) pada tahun 1969 yang digunakan untuk melakukan perancangan, pemantauan, evaluasi proyek pembangunan internasional (Martinez & Cooper, 2020). Pendekatan LFA sebagai metodologi penyusunan perencanaan didasarkan pada studi yang dilakukan oleh Rosenberg dan Hageboeck (1973) sebagai kepala Fry Consultants Inc yang bergerak dalam pendampingan penyusunan program perencanaan diberbagai negara melalui pogram yang difasilitasi oleh USAID.

Logical Framework Approach (LFA) yang biasa disebut sebagai “Logframe” merupakan suatu metode intelektual untuk melihat dengan jelas perbedaan apa yang dihasilkan atas satu aktivitas antara output (keluaran) sampai dengan impact (dampak) yang diharapkan untuk mencapai purpose (tujuan). Perumusan dari berbagai aktivitas / kegiatan yang direncanakan akan menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk fisik atau hasil jasa sebagai contoh Pembangunan Gedung rumah sakit, pelatihan sejumlah orang tenaga kesehatan, dan pengadaan sarana peralatan kesehatan. Dari hasil keluaran yang telah didapatkan kita berharap akan mendapatkan hasil sebagai dampak (impact) yang efektif dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Atas dampak yang telah dirasakan maka diharapkan terciptanya sumberdaya manusia yang berkualitas sebagai tujuan akhir pembangunan akhir (purpose) dapat tercapai.

FLA mengambil bentuk tabel matrik yang terdiri dari 4 baris dikali dengan 4 kolom yang saling berhubungan secara konseptual. Tabel baris menggambarkan tipe kegiatan dari rangkaian aktivitas, keluaran (outputs), manfaat (impact/benefits), tujuan ((purpose/goals). sedangkan tabel kolom menggambarkan rangkain informasi tentang deskripsi uraian kegiatan yang terdiri dari deskripsi naratif, indikator objektif yang dapat diverifikasi, uraian verifikasi indikator yang meliputi bagaimana informasi terkait indikator tersebut didapatkan (sumber data, formula, dan satuan indikator), dan terakhir berisi tentang asumsi – asumsi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi baik positif maupun negatif.

Inti dari pendekatan logical framework adalah “temporal logic model” atau model logika waktu yang berjalan melingkupi keseluruhan matrik logframe. Model logika waktu ini terbentuk dari rangkaian proposisi (kondisi standar) yang saling berhubungan. Kondisi pertama, jika aktivitas dapat dilaksanakan, dan seluruh asumsi terpenuhi maka keluaran dapat dihasilkan. Kondisi kedua, jika keluaran (outputs) sudah dihasilkan dan seluruh asumsi terpenuhi, maka dampak / manfaat dapat dirasakan. Kondisi ketiga, jika dampak/ manfaat telah dirasakan dan seluruh asumsi terpenuhi, maka tujuan dapat dicapai. seluruh kondisi diatas dipandang sebagai hierarki hipotesa, dimana tanggungjawab atas pelaksanaan proyek/ kegiatan/ program pada masing – masing level manajerial dapat dibagi secara hierarki sesuai tingkatannya. Dengan logika model waktu ini, tingkat validitas dan akurasi kesesuaian atas desain perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dapat diuji secara objektif. Sehingga dengan logical framework approach (LFA) ini esensi dari kajian metodologi ilmiah kemudian dapat diimplementasikan dalam kerangka kerja lapangan.

Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan identifikasi data sekunder terkait dengan penyelenggaraan transportasi di Kabupaten Kudus melalui hasil Rilis BPS baik secara elektronik maupun yang tertuang dalam Buku Kudus dalam angka Tahun 2022, dokumen RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023, Selain itu juga dilakukan pengolahan data secara mandiri dengan menggunakan metode statistik dan analisa ekonomi makro sesuai dengan teori yang berkembang.

Observasi juga dilakukan melalui informasi berita online untuk mendapatkan informasi aktual atas kondisi perekonomian global, nasional dan Daerah Kabupaten Kudus.

Metode Analisis data

Metode analisa data yang digunakan dengan melakukan analisa data eksisting yang ada dengan dibandingkan data benchmarking kondisi perekonomian urusan perdagangan sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan pembangunan daerah Kabupaten Kudus (Santoso & Amaliyah, 2022). Metode analisis data ini dipilih untuk mendapatkan perspektif ideal atas kondisi perekonomian yang ada sehingga mendapatkan gambaran yang menyeluruh atas kondisi eksisting dan capaian ekonomi terutama pada urusan perdagangan dengan menyesuaikan kondisi eksisting yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Ekonomi Global, Nasional, Regional Jawa Tengah dan Kabupaten Kudus

Kondisi perekonomian global saat ini memasuki tahap pemulihan atas dampak pandemi global virus Covid-19 yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Bank Dunia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2021 mengalami *rebound* sebesar 5.5 persen setelah mencatat pertumbuhan negatif sebesar 4,1 persen pada tahun 2020 (Hosseini, 2020). Meskipun pada tahun 2021 status pandemi wabah virus Covid-19 belum dinyatakan berakhir, namun para pelaku ekonomi diyakini mampu beradaptasi dengan pola kehidupan normal baru yang berlaku secara global.

Pada skala nasional, Indonesia dalam perekonomian dunia akan semakin diperhitungkan posisinya bersama dengan negara – negara berkembang lainnya menuju *emerging markets* dalam ekonomi global dengan keunggulan jumlah penduduk dan pasar domestik yang sangat dinamis. Kondisi perekonomian Indonesia dalam masa tahap pemulihan wabah virus Covid-19 sampai dengan triwulan III tahun 2021 ini mengalami pertumbuhan 3,51 persen secara *year to year*. Hal ini menunjukkan bahwa prospek ekonomi nasional pada tahun 2021 tampaknya akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020 yang mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -2,07 persen (Viryanto, 2023). Pertumbuhan beberapa lapangan usaha sudah menunjukkan trend positif seperti Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan Besar dan Eceran. Sedangkan beberapa sektor lapangan usaha yang masih mengalami trend negatif yaitu sektor Transportasi dan Pergudangan dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Pemerintah baik pusat maupun daerah telah memberikan prioritas utama Pembangunan Nasional tahun 2020 dan 2021 pada langkah – langkah mitigasi penanganan wabah Covid-19 berserta dampak distorsif wabah pandemi Covid-19 di berbagai sektor baik kesehatan, dan sosial dan ekonomi. Prioritas anggaran pembangunan menitikberatkan penanggulangan wabah Covid-19 pada sektor kesehatan terutama pada pembangunan sarana dan prasarana penanganan Covid-19 serta pengembangan riset terkait penanganan Covid-19 (Kuncoro et. al., 2021). Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dengan memberikan vaksinasi secara nasional bagi seluruh penduduk Indonesia yang telah mencapai sebesar 86, 14 persen untuk vaksinasi tahap I dan 58,88 persen untuk vaksinasi tahap II sampai bulan Januari 2022. Untuk sektor sosial dan ekonomi prioritas pembangunan dioptimalkan pada penanganan dampak ekonomi dengan perluasan bantuan langsung kepada masyarakat yang paling terdampak wabah Covid-19. Upaya lainnya adalah dengan melakukan rekayasa sosial di berbagai bidang baik pendidikan, sektor industri, transportasi dan pariwisata dengan melakukan pembatasan–pembatasan fisik dan mengurangi intensitas interaksi antar manusia untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19.

Berbagai kebijakan telah diambil oleh Pemerintah terutama untuk mendorong perekonomian nasional antara lain melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan mulai tahun 2020 dan berlanjut hingga tahun 2022. Kebijakan dari sisi fiskal juga dilakukan melalui insentif dari sisi perpajakan, belanja negara, baik dari pusat dan daerah, serta dukungan dari pembiayaan yang diharapkan akan terus mendorong berbagai kegiatan sektoral dan di daerah. Pemerintah melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan juga memastikan sektor keuangan dapat terjaga stabilitasnya dan bisa mendukung

pemulihan ekonomi. Realisasi APBN Tahun 2021 secara keseluruhan maupun program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mengalami akselerasi yang signifikan. Pemerintah Indonesia terus mendorong momentum pemulihan ekonomi ini dengan berbagai kebijakan yang ada. Penyerapan belanja APBN 2021 dan program PEN terus akan diakselerasi untuk penanganan masalah kesehatan akibat Covid-19, perlindungan sosial, program prioritas, insentif usaha, dukungan UMKM dan korporasi. Perubahan alokasi beberapa komponen PEN diantaranya penanganan kemiskinan ekstrem (PKE), program padat karya dan program jaminan kehilangan pekerjaan. Untuk mendukung pelaksanaan PEN di Jawa Tengah digunakan untuk jaring pengaman sosial, kesehatan dan ekonomi serta Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE).

Perekonomian dunia pada tahun 2022 dan 2023 masih akan menghadapi tantangan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, dimana negara – negara mulai mengurangi anggaran penanganan dampak wabah Covid-19. Proyeksi kondisi perekonomian global pada tahun 2022 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan lebih moderat sebesar 4,1 persen dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2021 yang mengalami rebound sebesar 5,5 persen. Hal ini disebabkan karena beberapa negara melakukan pengurangan dukungan anggaran penanggulangan Covid-19 (Teodoro, 2020). Selain itu adanya kebijakan pengetatan mobilitas masyarakat secara global menyebabkan terganggunya rantai pasokan persediaan bahan baku industri secara global. Prediksi pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh Bank Dunia menyebutkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2023 akan tumbuh positif kisaran angka 3,2 persen.

Menurut World Economic Outlook (IMF) perekonomian nasional Indonesia pada tahun 2022 dan 2023 diproyeksi akan tumbuh sebesar 5,6 persen dan 6 persen secara berturut – turut. Respon positif perekonomian global menjadi salah satu modal bagi pemulihan ekonomi Nasional terutama pada peningkatan produksi komoditas ekspor serta peningkatan transaksi keuangan dan investasi luar negeri. Selain itu, keberhasilan Pemerintah dalam pengendalian Covid-19 menjadi kunci utama pemulihan ekonomi dalam negeri, terutama melalui pemulihan aktivitas-aktivitas kunci perekonomian dalam sektor industri, transportasi, dan pariwisata terdampak cukup dalam akibat dampak pandemik Covid-19.

Kondisi Ekonomi Jawa Tengah

Secara kumulatif, ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2021 triwulan III mengalami pertumbuhan sebesar 2,44 persen dihitung secara *c to c* atau sebesar 2,56 persen jika dihitung secara *y to y*. tingkat pertumbuhan ekonomi yang cenderung kearah positif menjadi signal pemulihan ekonomi regional Provinsi Jawa Tengah sudah berjalan pada jalur yang semestinya. Tingkat inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,70 persen, hal ini menjadi pertanda bahwa stabilitas harga – harga umum di wilayah Jawa Tengah masih cenderung stabil. Pemulihan ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Tengah masih akan dipengaruhi oleh trend perekonomian pada skala nasional dan global.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2021, penyumbang pertumbuhan Jawa Tengah disumbang oleh Industri Pengolahan menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 2,62 persen, diikuti Konstruksi 12,91 persen, serta perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor sebesar 6,52 persen. Tumbuhnya tiga sektor basis ini diharapkan mampu memberikan efek berganda untuk mendorong rantai pasokan industri di Jawa Tengah. Sedangkan pertanian masih mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -6,12 persen diikuti oleh sektor informasi dan komunikasi sebesar 0,78 persen.

Untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2022, sektor perekonomian secara umum masih akan menghadapi tekanan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Hasil simulasi BI, proyeksi PDRB Jateng hanya akan tumbuh di bawah 5 persen ditunjang dengan penanganan melalui berbagai upaya *refocusing* pada program dan kegiatan yang mendukung perkuatan perekonomian masyarakat. Sementara itu, inflasi Jawa Tengah tahun 2022 meskipun terjadi kontraksi pada tahun 2020, namun diprediksikan masih terkendali pada kisaran 3,0±1% melalui perkuatan distribusi, ketersediaan dan kecukupan bahan kebutuhan pokok masyarakat serta terjaganya ekspektasi positif masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri dalam rancangan RKPD Jawa Tengah Tahun 2022 menetapkan target pertumbuhan Ekonomi Jawa

Tengah sebesar 3,93 sampai dengan 5,2 persen pada tahun anggaran 2022 dengan target pendapatan per kapita penduduk Jawa Tengah sebesar 39,24 juta rupiah. Selain itu, untuk target persentase kemiskinan ditetapkan sebesar 11,42–10,27 persen sedangkan untuk target persentase angka pengangguran ditetapkan sebesar 5,96 – 5,88 persen.

Melihat kondisi global dan kebijakan nasional, pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah “Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing SDM”, dengan prioritas pada peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM Jawa Tengah menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing, penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan resiko bencana, pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Mendasarkan pada kondisi tersebut maka perekonomian Jawa Tengah tahun 2023 diproyeksikan pada kisaran angka 5,00 - 5,60 persen. Sedangkan proyeksi pengendalian inflasi tetap berada pada kisaran $3,0 \pm 1$ persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut dengan asumsi efektifnya respon kebijakan kesehatan yang dibarengi dengan efektifnya mitigasi dampak ekonomi dan pemulihannya akibat pandemi Covid-19. Kebijakan pemberian vaksin kepada masyarakat diharapkan akan semakin meningkatkan mobilitas dan konsumsi domestik masyarakat yang mampu menggerakkan ekonomi daerah. Investasi juga diasumsikan akan semakin meningkat di tahun 2023 dengan semakin terkendalinya kasus pandemi Covid-19. Sektor-sektor unggulan Jawa Tengah juga diasumsikan akan terus membaik terutama yang terdampak seperti sektor pariwisata, perdagangan, dan industri pengolahan.

Ekonomi yang diproyeksikan akan tumbuh positif di tahun 2023 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2023 angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,51 – 9,29 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 4,00 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 43,32 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar $3,0 \pm 1$ di tahun 2023.

Tabel 1
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,00 -5,60
2	PDRB ADHK	Milyar Rp	1.118,21
3	PDRB per kapita	Juta Rp	43,32
4	Inflasi	%	$3,0 \pm 1$
5	Nilai PMA dan PMDN	Milyar Rp	59.932,02
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,36 - 4,80
7	Angka Kemiskinan	%	9,51 – 9,29
8	Rasio Gini	Angka	0,34

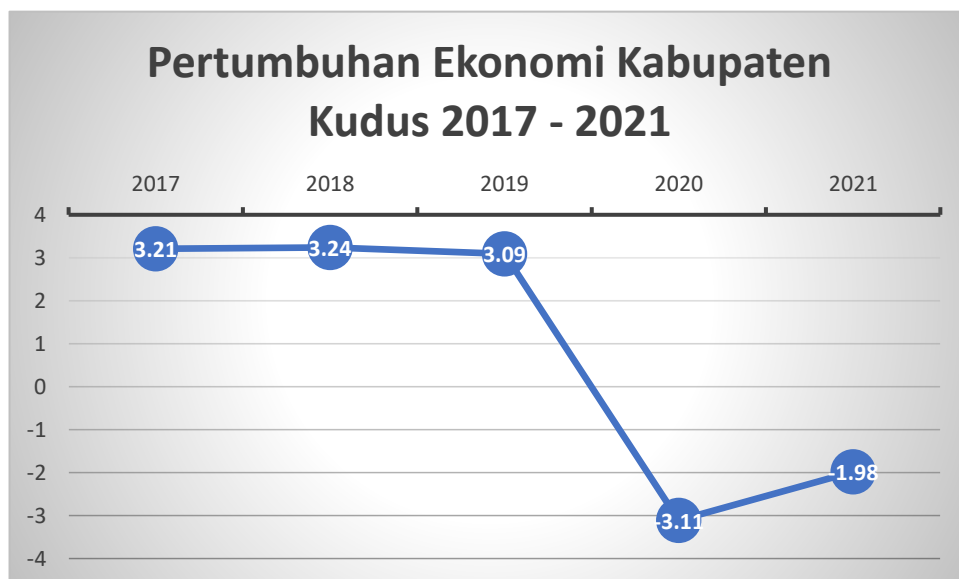
Sumber: Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada "Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Berdikari". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2023 difokuskan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat. Beberapa strategi yang dilakukan untuk menjaga perekonomian daerah tahun 2023 tetap positif bahkan meningkat, serta mampu memulihkan ekonomi masyarakat antara lain:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Kondisi Ekonomi Kabupaten Kudus

Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Adapun gambaran pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus sebagaimana tabel berikut :



Gambar 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Kudus Tahun 2017 – 2021

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kudus pada tahun 2021 sebesar -1,98 persen masih mengikuti trend penurunan pertumbuhan tahun 2020 yang turun sebesar -3,11. Dilihat dari data pertumbuhan sektoral per lapangan usaha, kondisi laju pertumbuhan negatif PDRB Kabupaten kudus pada tahun 2021 berbeda kondisi tahun 2020, dimana pada tahun 2020 penurunan terjadi hampir di semua sektor lapangan usaha sedangkan pada tahun 2021 penurunan PRDB didominasi sektor industri pengolahan. Hal ini memberikan gambaran bahwa, sektor – sektor usaha di Kabupaten Kudus telah mampu bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi yang terjadi pada tahun 2020, dimana Sebagian besar sektor usaha di Kabupaten Kudus mengalami laju pertumbuhan negative akibat Covid 19.

Apabila dilihat lebih jauh terkait dengan pertumbuhan PDRB tanpa IHT, maka dapat diketahui bahwa PDRB tanpa IHT masih tumbuh sebesar 4,63 persen setelah sebelumnya mengalami kontraksi sebesar -5,26 pada 2020 sebagai dampak Covid 19. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor industri yang mengalami penurunan di Kabupaten Kudus hanya sektor industri IHT. Namun karena dominasi sektor usaha IHT masih mendominasi sumbangan PDRB Kudus sekitar

72 persen dari total PDRB, sehingga peningkatan pertumbuhan sektor usaha tanpa IHT masih belum cukup mengimbangi penurunan sektor usaha IHT.

Tabel 2
Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Distribusi PRDB Menurut Kabupaten/Kota di sekitar Kabupaten Kudus

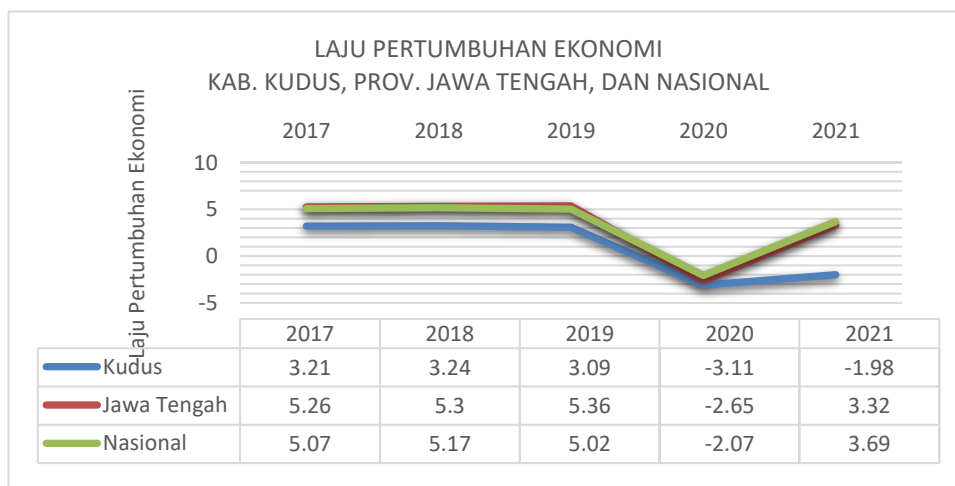
Kabupaten Sekitar / Provinsi Jawa Tengah	2019		2020		2021	
	PDRB (Trilyun Rp)	Kontribusi Provinsi (%)	PDRB (Trilyun Rp)	Kontribusi Provinsi (%)	PDRB (Trilyun Rp)	Kontribusi Provinsi (%)
Kabupaten Blora	25,97	1.91	24,01	1.78	26,96	1.90
Kabupaten Rembang	18,94	1.39	18,94	1.41	20,07	1.41
Kabupaten Pati	43,04	3.16	43,29	3.21	45,57	3.21
Kabupaten Kudus	110,58	8.13	109,53	8.13	108,21	7.61
Kabupaten Jepara	30,23	2.22	30,18	2.24	32,05	2.25

*Ket * : angka sementara; ** : angka sangat sementara*

Sumber: SIPD – Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Memperhatikan tabel di atas, berdasarkan nilai PDRB tahun 2019 sampai dengan 2020 nilai kontribusi Kabupaten Kudus terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah berada pada kisaran 8,13 persen dimana dibanding dengan kabupaten sekitarnya, Kabupaten Kudus menempati nilai kontribusi PDRB Provinsi paling tinggi. Pada tahun 2021, nilai kontribusi PDRB Kabupaten Kudus terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah turun menjadi 7,61 persen karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus masih mengalami kontraksi sebesar -1,98, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah naik sebesar 3,32 persen. Dibanding dengan Kabupaten 5 Kabupaten lainnya disekitar Kudus, kontribusi PDRB Kabupaten Kudus masih jauh lebih tinggi, dimana rata – rata kontribusi Kabupaten sekitar Kudus sekitar 1,40 sampai 3,21 persen. Hal ini merupakan salah satu keunggulan Kabupaten Kudus sebagai daerah yang PDRBnya ditopang oleh sektor Industri Pengolahan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus dan Daerah sekitar dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber :SIPD – BPS 2021, Bappeda (data diolah) Tahun 2021

Gambar 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus dengan Jateng dan Nasional

Laju pertumbuhan Ekonomi tahun 2021 baik di tingkat Kabupaten Kudus masih mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -1,98 persen karena masih lesunya sektor industri pengolahan hasil

tembakau akibat pandemic Covid19 secara global. Untuk laju pertumbuhan ekonomi tahun 2021 untuk Provinsi Jawa Tengah dan Nasional telah mengalami pemulihan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan yang mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi secara umum telah bangkit kembali, meskipun kondisi pandemi masih terjadi sampai akhir tahun 2021. Diharapkan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2022 dan 2023 akan mengalami pertumbuhan lebih tinggi lagi dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021.

Nilai PDRB Kabupaten Kudus dihitung dari hasil akumulasi nilai produksi bruto dari 17 sektor lapangan usaha. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Kudus secara umum pada tahun 2018 ke tahun 2022 mengalami peningkatan, nilai tertinggi tercapai pada tahun 2022 sebesar 110.580.428,47 juta rupiah sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 total PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Kudus mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid19. Dilihat dari nilai output per sektor lapangan usaha, nilai tertinggi penyumbang PDRB Kabupaten Kudus ditempati oleh sektor Industri pengolahan dengan nilai 88.916.629,35 juta rupiah pada tahun 2019, namun kemudian turun menjadi 86.187.090,33 juta rupiah pada tahun 2021. Nilai sektor lapangan usaha tersebut didominasi oleh industri pengolahan hasil tembakau. Sehingga untuk melihat nilai sektor usahanya lainnya, perlu dilakukan penghitungan PDRB Kabupaten Kudus tanpa industri hasil tembakau (tanpa IHT). Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Kudus tanpa hasil tembakau secara konsisten mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 karena terdampak Covid19. Pada tahun 2021, PDRB Kabupaten Kudus tanpa IHT mengalami peningkatan tertinggi sebesar 30.216.479,14 juta rupiah, yang mengindikasikan bahwa selain sektor industri IHT, perekonomian Kabupaten Kudus telah kembali bangkit dari dampak Covid19.

Untuk melihat nilai riil atas pertumbuhan ekonomi daerah perlu mengacu pada PDRB atas dasar harga konstan. Dilihat dari nilai PDRB atas dasar harga konstan, total PDRB Kabupaten Kudus mengalami peningkatan yang cukup stabil dari tahun 2017 – 2019, kemudian mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak dari pandemi Covid19. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2021
(juta Rupiah)

	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.566.633,01	1.611.363,00	1.676.134,20	1.679.775,45	1.692.251,42
B	Pertambangan dan Penggalian	76.831,38	79.744,32	83.280,27	84.877,41	89.384,40
C	Industri Pengolahan	54.575.827,58	55.963.198,01	57.325.057,61	55.896.574,97	53.813.643,58
D	Pengadaan Listrik dan Gas	36.197,52	38.146,31	40.218,38	41.734,82	42.970,97
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15.953,03	16.754,40	17.496,95	19.059,38	19.752,74
F	Konstruksi	2.488.118,11	2.640.622,92	2.771.382,34	2.502.405,25	2.696.306,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.135.702,42	4.366.550,82	4.593.610,30	4.250.453,12	4.459.332,77
H	Transportasi dan Pergudangan	854.345,60	913.671,10	986.656,37	757.771,07	791.213,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	865.734,83	939.674,05	1.015.058,10	928.008,02	978.727,53
J	Informasi dan Komunikasi	584.509,10	662.657,24	729.748,32	857.954,41	958.720,29
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.214.327,69	1.245.161,66	1.268.499,44	1.298.726,90	1.342.079,50
L	Real Estate	447.587,35	472.385,66	497.957,44	487.491,60	500.480,59
M,N	Jasa Perusahaan	76.269,73	83.260,58	90.771,97	88.335,14	90.481,68
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	544.739,24	564.247,46	584.842,58	575.377,28	578.080,05

	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020*	2021**
P	Jasa Pendidikan	694.750,65	748.835,31	803.916,64	790.657,52	794.916,51
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	228.084,05	248.429,37	264.760,39	267.448,04	267.701,23
R,S , T,U	Jasa Lainnya	415.550,90	454.271,10	492.386,15	435.098,12	440.884,92
	PDRB TOTAL	68.821.162,19	71.048.973,31	73.241.777,45	70.961.748,50	69.556.927,81
	PDRB TANPA INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU	19.446.456,69	20.510.975,66	21.663.453,90	20.524.595,36	21.473.922,65

Sumber : SIPD-BPS, Kudus Dalam Angka Tahun 2021

Ditinjau dari kontribusi lapangan usaha, sektor Industri pengolahan masih menjadi kontributor utama, sebagai pemberi andil terbesar dalam PDRB tahun 2021. Kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan PDRB tahun 2021 atas dasar harga berlaku sebesar 79,64%. Industri Pengolahan sangat berperan dalam penurunan PDRB. Tahun 2017 berkontribusi 80,85% di tahun 2021 menjadi 79,64% atau turun -1,21%. Sedangkan lapangan usaha selain Industri Pengolahan relative mengalami peningkatan, namun demikian mengingat peranannya yang tidak dominan, peningkatan ini tidak dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus. Selain itu, apabila dilihat dari kontribusi PDRB tanpa IHT, maka sektor lapangan usaha selain IHT menyumbang PDRB sebesar 27, 92 persen pada tahun 2021 meingkat sebesar 1,76 persen dari kontribusi sektor lapangan usaha selain IHT tahun 2017 sebesar 26,16 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor lapangan usaha selain IHT secara perlahan semakin memberikan andil dalam pembentukan nilai perekonomian Kabupaten Kudus. Di lain pihak, sektor industri pengolahan IHT meskipun tetap menjadi basis ekonomi Kabupaten Kudus, namun kontribusinya perlahan sudah mulai berkurang.

Adapun Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4
Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2021

No.	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,26	2,25	2,24	2,32	2,39
B	Pertambangan dan Penggalian	0,14	0,14	0,14	0,15	0,16
C	Industri Pengolahan	80,85	80,63	80,41	81,06	79,64
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi	3,36	3,48	3,54	3,23	3,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,40	5,43	5,48	5,16	5,57
H	Transportasi dan Pergudangan	1,03	1,04	1,08	0,86	0,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,14	1,16	1,20	1,12	1,23
J	Informasi dan Komunikasi	0,60	0,64	0,67	0,79	0,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,80	1,78	1,73	1,81	1,97
L	Real Estate	0,54	0,55	0,55	0,54	0,57
M,N	Jasa Perusahaan	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,78	0,76	0,76	0,77	0,78
P	Jasa Pendidikan	1,07	1,10	1,14	1,13	1,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,31	0,32	0,33	0,35	0,36

No.	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020*	2021**
R,S,T, U	Jasa Lainnya	0,54	0,55	0,57	0,51	0,53
	PDRB	100	100	100	100	100
	PDRB TANPA INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU	26,16	26,38	26,67	25,82	27,92

Sumber : SIPD – BPS, Kudus Dalam Angka Tahun 2022

Tabel 5
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha
Tahun 2017 - 2021 (Milyar Rupiah)

Sektor PDRB Lapangan Usaha Tahun 2010	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kudus (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.84	2.86	4.02	0.22	0.74
B. Pertambangan dan Penggalian	4.26	3.79	4.43	1.92	5.31
C. Industri Pengolahan	2.48	2.54	2.43	-2.49	-3.73
D. Pengadaan Listrik dan Gas	6.16	5.38	5.43	3.77	2.96
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.13	5.02	4.43	8.93	3.64
F. Konstruksi	7.43	6.13	4.95	-9.71	7.75
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.08	5.58	5.20	-7.47	4.91
H. Transportasi dan Pergudangan	6.19	6.94	7.99	-23.20	4.41
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.47	8.54	8.02	-8.58	5.47
J. Informasi dan Komunikasi	14.81	13.37	10.12	17.57	11.74
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.62	2.54	1.87	2.38	3.34
L. Real Estate	6.29	5.54	5.41	-2.10	2.66
M,N. Jasa Perusahaan	8.77	9.17	9.02	-2.68	2.43
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.55	3.58	3.65	-1.62	0.47
P. Jasa Pendidikan	7.18	7.78	7.36	-1.65	0.54
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.75	8.92	6.57	1.02	0.09
R,S,T,U. Jasa lainnya	9.13	9.32	8.39	-11.63	1.33
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	3.21	3.24	3.09	-3.11	-1.98
PERTUMBUHAN TANPA IHT	5,48	5,47	5,62	-5,26	4,63

Sumber : SIPD–BPS, Kudus Dalam Angka Tahun 2022

Pembahasan

Dengan uraian kondisi perekonomian pada berbagai Jenjang wilayah yang telah dibahas diatas, perumusan tujuan pembangunan dalam bidasng ekonomi dapat dijabarkan sebagaimana matrik yang terlampir dibawah ini :

Tabel 6
Matrik Logical Framework Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Aktivitas / Program	Keluaran	Dampak	Tujuan
---------------------	----------	--------	--------

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian 2. Menurunkan serangan hama/penyakit pertanian 3. Meningkatkan Kapasitas SDM dan kelembagaan petani 4. Meningkatkan sarana dan prasarana Produksi Perikanan	1. Peningkatan produksi pertanian dan perikanan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor non-IHT	Transformasi ekonomi yang berdaya saing
5. Meningkatkan Pemasaran Pariwisata Daerah 6. Membangun Industri Pariwisata 7. Mengembangkan Ekonomi Kreatif	2. Peningkatan Nilai Belanja Wisatawan		
8. Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan 9. Meningkatkan Pertumbuhan Ekspor produk lokal Kudus 10. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perdagangan	3. Peningkatan Volume Perdagangan		
11. Meningkatkan Industri Kecil Menengah	4. Peningkatan Pertumbuhan Industri Kecil Menengah		
12. Meningkatkan Kapasitas Produksi Usaha Mikro	5. Peningkatan Omzet Usaha Mikro		
13. Meningkatkan Kapasitas Pengelola Koperasi	6. Peningkatan Kualitas Koperasi		
14. Meningkatkan pelayanan perijinan berusaha 15. Meningkatkan dukungan kemudahan investasi 16. Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi penanaman modal 17. Meningkatkan pelaporan realisasi penanaman modal	1. Peningkatan daya tarik investasi	Terciptanya iklim investasi yang kondusif	
18. Meningkatkan kualitas fasilitas dan prasarana transportasi 19. Meningkatkan akses dan kualitas	2. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pendukung		

infrastruktur pekerjaan umum	perekonomian		
20. Meningkatkan kualitas jaringan irigasi			
21. Meningkatkan kualitas jaringan drainase			
22. Mengoptimalkan Perencanaan tata Ruang	23. Peningkatan Penyelenggaraan Tata Ruang		

Sumber: Rancangan RPD (diolah Bappeda)

Dari uraian yang terjadi di tingkat pusat, provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kudus, yang disimpulkan dari isu strategis dan permasalahan yang timbul maka, penentuan aktivitas yang dimplementasikan sebagai program daerah, yang diharapkan dapat memberikan manfaat / dampak dari tercapainya output berupa sasaran pembangunan daerah dan diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan yang ingin dicapai berupa “Transformasi Ekonomi yang Berdaya Saing”.

SIMPULAN

Identifikasi isu strategis merupakan gambaran umum atas kondisi nyata perekonomian daerah yang disimpulkan dalam satu kalimat sederhana yang merangkum seluruh permasalahan dan kondisi kekinian suatu daerah yang menjadi lokus pembahasan. Hasil identifikasi isu strategis bidang perekonomian dapat disarikan dalam satu kalimat yaitu “Transformasi Ekonomi yang berdaya saing” yang akan menjadi bahan perumusan kebijakan bagi Pemerintah Daerah khususnya Bappeda dalam menentukan tujuan dan sasaran perencanaan daerah yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah 2024 – 2026.

SARAN

Hasil identifikasi perumusan tujuan pembangunan ekonomi daerah berupa “Transformasi Ekonomi Yang Berdaya Saing” dapat menjadi landasan ilmiah sebagai pendekatan teknokratik dalam penyusunan Rancangan RPD Kabupaten Kudus 2024 – 2026 masih perlu dilengkapi dengan informasi – informasi lain yang terkait antara lain angka partisipasi tenaga kerja, realisasi investasi, tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kudus serta informasi terkait dengan dinamika ekonomi global, nasional, dan regional sehingga memberi gambaran yang lebih tepat dalam menentukan isu strategis daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH (Opsional)

Ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian dan penulisan laporan penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Bihandjeng, H. (2019). *Perencanaan pembangunan partisipatif desa*. Deepublish.
- Hosseini, S. E. (2020). An outlook on the global development of renewable and sustainable energy at the time of COVID-19. *Energy Research & Social Science*, 68, 101633.
- Kehler, S., & Birchall, S. J. (2021). Social vulnerability and climate change adaptation: The critical importance of moving beyond technocratic policy approaches. *Environmental Science & Policy*, 124, 471-477.
- Kuncoro, M., Widoyono, S. B., Nursetyohadi, D., Agb, M., WURANTI, H., SRININGSIH, S., ... & Dev, M. E. (2021). *Jawa Tengah Melawan Pandemi Dan Resesi*. Penerbit Andi.

- Leontinus, G. (2022). Program Dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs) Dalam Hal Masalah Perubahan Iklim Di Indonesia. *Jurnal Samudra Geografi*, 5(1), 43-52.
- Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma pengembangan model pembangunan nasional Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(1), 77-92.
- Martinez, D. E., & Cooper, D. J. (2020). Seeing through the logical framework. *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 31, 1239-1253.
- Munir, M. S. (2021). *Pengaruh Jumlah Penduduk, Investasi, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kudus* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- Nihayah, S. N. F. (2022). *Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (Pmdn) Dan Belanja Modal Berbasis Syariah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2019 (Studi Kasus Dpmpstsp Kota Kudus)* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- Qodrianto, R., & Meytasari, C. (2019). *Perancangan Pusat Penelitian Konservasi Air Sungai Di Kota Magelang-Jawa Tengah Dengan Pendekatan Atraktif-Teknokratik* (Doctoral dissertation, University of Technology Yogyakarta).
- Rosenberg, L. J., & Hageboeck, M. (1973). Management technology and the developing world. *IFAC Proceedings Volumes*, 6(1), 1-5.
- Santoso, D. A., & Amaliyah, F. (2022). Keterampilan Proses Mahasiswa PGSD dalam Pembelajaran Kooperatif dengan Strategi Course Review Horay secara Daring. In *Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis Universitas Muria Kudus* (Vol. 1, No. 1, pp. 204-209).
- Suri, D. (2019). Pemanfaatan Media Komunikasi dan Informasi dalam Perwujudan Pembangunan Nasional. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(2), 177-187.
- Teodoro, A. (2020). *Contesting the global development of sustainable and inclusive education: Education reform and the challenges of neoliberal globalization*. routledge.
- Viryanto, F. A. (2023). Penerapan Model Regresi Data Panel dalam Identifikasi Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Tahun 2019-2021: Penerapan Model Regresi Data Panel dalam Identifikasi Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Persentase Penduduk Miskin. *Emerging Statistics and Data Science Journal*, 1(2), 268-280.